

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ARDHINI
NIM. C2C607023

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ardhini
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607023
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH RASIO KEUANGAN
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
UNTUK PELAYANAN PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TENGAH)**

Dosen Pembimbing : Hj. Rr. Sri Handayani, SE, Msi, Akt

Semarang, 24 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Hj. Rr. Sri Handayani, SE, M.Si, Akt)

NIP. 1974100551998022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ardhini
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607023
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH RASIO KEUANGAN
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
UNTUK PELAYANAN PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TENGAH)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Juli 2011

Tim Penguji

1. Hj. Rr. Sri Handayani, SE, MSi, Akt (.....)
2. Shiddiq Nur Rahardjo, SE, MSi, Akt (.....)
3. Dr. Endang Kiswara, M.Si, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ardhini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Ardhini)

NIM : C2C607023

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the influence of Local Government Measurement Ratio toward the Capital Expenditure for Public Services. The independent variables are The Autonomy rate, The Effectiveness rate, Efficiency rate, SiLPA and the dependent variable is Capital Expenditure for Public Services.

The samples which are use in this research are regency/municipality of Central Java province that report routine the realization report of the estimate income of regional expense (APBD) from 2007 until 2008 for Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah(www.djpkpd.go.id). Besides, the writer get data of APBD 2009 period from BPS Jawa Tengah. The analytical method for determining statistical tests with SPSS (Statistical Package for the Social) 17.00 software.

The results of this research show that The Autonomy rate has negative influence toward the capital expenditure for public service. The effectiveness rate has positive influence toward capital expenditure for public service. The efficiency rate has negative influence toward capital expenditure for public service. SiLPA has positive influence toward capital expenditure for public service , and the capital expenditure for public service has negative influence toward Gini Index as the Economic Growth. This results are still need the further confirmation for the next research. Because of the lack of this research .

Key Words : *autonomy ratio, effectiveness , efficiency, Local Government Finance, capital expenditure, Economic Growth, Gini Index*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah rasio keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas keuangan daerah, tingkat efisiensi keuangan daerah, SiLPA dan variabel dependennya adalah belanja modal untuk pelayanan publik pemerintah daerah.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian asosiatif kausal, dengan jumlah sampel 35 Kabupaten/ Kota setiap tahunnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2007-2009. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari BPS dalam Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpkpd.go.id). Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang dikutip dari buku, perpustakaan, artikel, majalah dan sumber-sumber lain yang menambah keakuratan data. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik dengan perangkat SPSS (*Statistical Package for the Social*) 17.00.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan dengan Rasio Gini. Hasil penelitian ini tetap memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelitian selanjutnya. Hal ini diperlukan karena keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

Kata kunci : rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keuangan daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, indeks *Gini*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Hj. Rr. Sri Handayani, SE, MSi, Akt selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
3. Drs. Sudarno, MSi,Akt, Ph.D, selaku dosen wali.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi.
5. Kedua orang tua saya (Toto Sularto dan Siti Suwarti) yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi putri-putrinya. Terima kasih atas semua pengorbanan Bapak dan Ibu untuk saya. Dhini sayang Bapak dan Ibu.

6. Kakak saya (Rhoitosi dan Andi Herwana, SE) yang telah banyak mendukung saya baik moriil dan materiil.
7. Mas Fajar Supangat, ST yang selalu mendukung dan mengajarkan kesabaran serta selalu mengingatkan saya untuk terus berusaha. Terima kasih untuk semuanya semoga kesuksesan selalu ada di tangan kita.
8. Sahabat dekat saya Pardiana Wijayanti dan Pramita Diah yang meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan berwisata kuliner di sela-sela kuliah.
9. Sahabat – sahabat saya di *Immersion Class*, khususnya Amalia Rachma Sari, Nia Kartini, Ummi Nafiatil Ilmi, Nindya Fitriana, dan Anindhitya Rizky yang setia memberi perhatian beserta semangatnya dalam mengerjakan skripsi.
Heart u all hunnies.
10. Teman-teman jurusan Akuntansi kelas A angkatan 2007, khususnya H.A.B.E.N.K Memey, Budi, Citra, Etha, Dewa, Iwul, *Tegaleers*, *Sinyo Family*, *SMA 5 girls*, *Alim Girls*, yang telah menjadi teman sekelas yang saaangaatt menyenangkan selama 3,5 tahun ini. Sukses selalu untuk kita bersama.
11. Teman-teman KKN Kecamatan Tembalang, *kangen kegilaan bersama kalian di posko Kecamatan* dan teman – teman KKN Kelurahan Sendangmulyo yang telah menjadi keluarga dadakan selama 1 bulan yang menyenangkan di Posko Kelurahan.
12. Teman–teman satu bimbingan, Mbak Iin, Lilis, Hana, Mas Aji yang selalu menyempatkan diskusi dikala menunggu bimbingan.

13. Perpustakaan FE UNDIP dan UPT Perpustakaan UNDIP yang telah menyediakan semua materi-materi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Petugas Perpustakaan BPS Jawa Tengah yang membantu saya mencari data skripsi.
15. Petugas TU FE Undip yang selalu membantu saya dalam mempersiapkan persyaratan sidang. Terima kasih banyak.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya.

Semarang, 24 Juni 2011

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

When you need to find the strength·It's your faith that makes you stronger· The only way you get there is ~one step at a time ~ dhini

*Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy·
(Norman Vincent Peale)*

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran·
(James Thurber)*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ibu dan Bapak tercinta, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang yang berlimpah.
- Mas dan Mbak yang selalu mendukung dan membimbingku dengan sabar.
- Kekasih, Saudara, dan Sahabat yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberi nasihat yang berarti dalam hidupku.

karena kalian inspirasi...

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah.....	11
2.1.1.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif.....	13
2.1.1.2 Hubungan Keagenan dalam Pemanfaatan Anggaran Daerah di Indonesia.....	15
2.1.1.3 Masalah Keagenan di Eksekutif.....	16
2.1.2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	18

2.1.3. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.....	21
2.1.4. Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	22
2.1.4.1 Analisis Kemandirian Daerah.....	25
2.1.4.2 Analisis Efektifitas terhadap PAD.....	26
2.1.4.3 Analisis Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	27
2.1.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
2.1.6.1 Pajak Daerah.....	28
2.1.6.2 Retribusi Daerah.....	29
2.1.6.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan.....	31
2.1.6.4 Lain-Lain PAD yang Sah.....	31
2.1.7. Belanja Modal untuk Pelayanan Publik.....	34
2.1.8. Luas Wilayah.....	36
2.1.9. Dana Alokasi Khusus.....	36
2.1.10. Pertumbuhan Ekonomi.....	37
2.2. Review Penelitian Terdahulu	37
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	42
2.4. Pengembangan Hipotesis	43
2.4.1 Hubungan Kemandirian Daerah dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik.....	43
2.4.2 Hubungan Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik.....	44
2.4.3 Hubungan SiLPA dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik.....	46
2.4.4 Hubungan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	47

BAB III	METODE PENELITIAN	50
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	50
3.1.1.	Kemandirian Daerah	50
3.1.2.	Efektivitas Keuangan Daerah.....	52
3.1.3.	Efisiensi Keuangan Daerah	53
3.1.4.	SiLPA	54
3.1.5.	Luas Wilayah.....	54
3.1.6.	Dana Alokasi Khusus	54
3.1.7.	Belanja Modal untuk Pelayanan Publik	55
3.1.8.	Pertumbuhan Ekonomi.....	55
3.2.	Populasi dan Sampel	56
3.3.	Jenis dan Sumber Data	57
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	58
3.5.	Metode Analisis	58
3.5.1.	Statistik Deskriptif.....	59
3.5.2.	Pengujian Asumsi Klasik	59
3.5.2.1.	Uji Normalitas.....	60
3.5.2.2.	Uji Multikolonieritas.....	61
3.5.2.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	61
3.5.3.	Model Regresi	62
3.5.4.	Pengujian Hipotesis.....	63
3.5.4.1.	Koefisien Determinasi.....	63
3.5.4.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	64
3.5.4.3.	Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t).....	64
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	65
4.1.	Diskripsi Objek Penelitian	65
4.2.	Analisis Data	65
4.2.1.	<i>Descriptive Statistic</i> (Statistik Deskriptif).....	65
4.2.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	70

4.2.2.1. Hasil Uji Normalitas	70
4.2.2.2. Hasil Uji Multikolonieritas	72
4.2.2.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	74
4.2.3. Hasil Pengujian Hipotesis Model 1	75
4.2.3.1. Analisis Regresi, Uji statistik F, Uji t	75
4.2.3.2. Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen	76
4.2.4. Hasil Pengujian Hipotesis Model 2	79
4.2.4.1. Analisis Regresi, Uji statistik F, Uji t	79
4.2.4.2. Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen	80
4.3. Interpretasi Hasil	80
4.3.1. Hubungan Kemandirian Daerah dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik	81
4.3.2. Hubungan Efektivitas Keuangan Daerah dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik	81
4.3.3. Hubungan Efisiensi Keuangan Daerah dengan alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik	81
4.3.4. Hubungan SiLPA dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik	82
4.3.5. Hubungan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dengan Pertumbuhan Ekonomi	83
BAB V PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Keterbatasan	86
5.3. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	19
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Definisi Operatif Variabel	56
Tabel 4.1 Jenis dan Sumber Data.....	65
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas Model 1.....	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas Model 2.....	73
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Model 1	75
Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Model 2	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	20
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis (Model 1).....	42
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (Model 2).....	43
Gambar 4.1 Grafik Histogram Model 1	70
Gambar 4.2 Grafik Histogram Model 2	71
Gambar 4.3 Grafik Normal P-P Regression Standardized Residual Model 1	71
Gambar 4.4 Grafik Normal P-P Regression Standardized Residual Model 2.....	72
Gambar 4.5 Scatterplot Model 1.....	74
Gambar 4.6 Scatterplot Model 2.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Hasil Penghitungan Data	91
Lampiran B Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 17.00	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip *money follows function* sebagai konsekwensi dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah ekonomis, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti dari pembaharuan tersebut adalah untuk mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini akan mempengaruhi prinsip pengelolaan, mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban Keuangan Daerah (BPK, 2009).

Tiga (3) paket Undang-Undang Keuangan Negara telah merefleksikan perubahan yang sangat fundamental terhadap manajemen Keuangan Daerah, yang pada intinya bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance & Clean Governance*) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik (*Best Practice*) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Keuangan Daerah adalah terkait dengan upaya

penguatan sistem perekonomian yang secara langsung membawa kesejahteraan yang nyata, seperti mengatasi pengangguran, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan lapangan kerja yang merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam skala tertentu.

Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelolala sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* kepada masyarakat di daerah (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Sesuai dengan deskripsi dan arah penggunaan dana-dana daerah yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa sebagian besar pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kecuali sebagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk memenuhi hak-hak Pegawai Negeri untuk Gaji beserta Tunjangannya, yang pelaksanaan pengganggarannya telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dengan standar yang baku. Sementara itu Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan secara khusus untuk kepentingan yang khusus pula.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian, tidak mempunyai perbedaan yang signifikan pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian

Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ke-lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain dengan indikator tersebut (Susantih,2009). Rasio Kemandirian Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah. Sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini senada dengan penelitian Vegasari (2011) bahwa Rasio Kemandirian Daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya.

Untuk Rasio Efektivitas, diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan Vegasari (2011) menerangkan bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan. Sehingga memunculkan suatu dilema tentang moral hazard pemerintah daerah tentang penggunaan PAD.

Sedangkan untuk Rasio Efisiensi Daerah, diukur dengan cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi. Hal ini senada dengan penelitian Vegasari (2011) bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya. Hal ini juga memunculkan pertanyaan, daerah yang dikatakan efisien secara keuangan akan dapat mempengaruhi jumlah belanja modal, padahal

efisiensi tidak memerlukan jumlah pengeluaran yang besar atau dalam hal ini disebut belanja.

Moral hazard pemerintah daerah juga dipertanyakan dalam hal ini tentang kelanjutan penggunaan penerimaan daerah khususnya PAD. PAD yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju, sehingga pengalokasian untuk belanja modal juga dipertanyakan. Daerah yang maju cenderung mempertahankan struktur belanja menjadi belanja pemeliharaan (Handayani, 2011). Tidak serta merta untuk belanja modal saja. Pergeseran pola belanja ini yang menjadi permasalahan krusial di pemerintah daerah mengingat sejauh mana pentingnya diadakan pendanaan untuk belanja modal.

SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target Penerimaan Daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sejauh ini mekanisme penggunaan SiLPA masih pro dan kontra. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana (Lulung, 2011). Sebagian besar SiLPA

disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang di dalamnya juga terdapat Belanja Tidak Langsung lebih kecil dari jumlah Belanja Tidak Langsung (Panggabean, 2010). Sehingga banyak permasalahan misalnya tentang penggunaan dana SiLPA untuk belanja modal tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Moral hazard pemerintah daerah dalam hal ini patut dipertanyakan karena perlu adanya kejelasan penggunaan SiLPA untuk belanja publik ataupun belanja aparatur semata.

Motivasi yang melandasi penelitian ini antara lain adanya pergeseran pola belanja dalam pemerintah daerah khususnya belanja modal. Hal ini memicu permasalahan tentang sejauh mana besarnya PAD mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan publik. Beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah telah menimbulkan distorsi pasar dan *high cost economy* (Saad, Ilyas., 2003). Sehingga diasumsikan jika belanja modal untuk pelayanan publik meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim dan Abdullah, 2004).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2006 hingga 2009 dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan periode waktu tersebut karena dengan menggunakan data 3 tahun terakhir dari penyusunan penelitian ini,

diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Pemilihan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki mobilitas tinggi dalam hal belanja modal dan mempunyai pembagian kerjasama antar daerah yang cukup jelas. Pada penelitian sebelumnya hanya mengukur kinerja instansi keuangan pada daerah yang berbeda dan pada penelitian ini digabungkan ke dalam suatu hubungan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik. Jadi dalam penelitian ini, benar-benar diulas materi yang relevan dengan didasarkan pada keadaan *riil* yang ada di Pemerintahan disertai dengan materi yang mendukung. Dalam penelitian ini, variabel control yang digunakan berupa Luas Wilayah. Luas Wilayah digunakan sebagai salah satu variabel control karena dalam realisasinya belanja modal untuk kepentingan publik cenderung berupa pembangunan fisik di suatu kawasan atau daerah tersebut. Luas wilayah menjadi tolak ukur, sinkronisasi benar tidaknya jika wilayahnya luas secara geografis akan mempengaruhi jumlah belanja modal di Pemerintah Daerah tersebut. DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan variabel kontrol mengikuti pola arah transfer pemerintah pusat.

Untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan Pemerintah Daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, maka peneliti melakukan penelitian berjudul ” **Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk meningkatkan pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal diperlukan pengetahuan mengenai komponen-komponen apa saja yang berpengaruh positif terhadap jumlah alokasi untuk belanja modal pelayanan publik.

Dari sektor kinerja instansi, dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Dari sektor pendapatan, yang dimungkinkan berpengaruh terhadap jumlah belanja modal adalah SiLPA. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemandirian Daerah tahun sebelumnya dapat mempengaruhi Belanja Modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk pelayanan publik tahun berjalan?
2. Apakah Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dapat mempengaruhi Belanja Modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk Pelayanan Publik?
3. Apakah Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dapat mempengaruhi Belanja Modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk pelayanan publik?
4. Apakah SiLPA Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi Belanja Modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk pelayanan publik ?
5. Apakah Belanja Modal yang peruntukannya untuk pelayanan publik dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbandingan indikator kinerja keuangan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan antara pengaruh rasio keuangan dalam instansi privat dan instansi publik terhadap belanja modal.
3. Untuk menganalisis dan memberikan verifikasi berlakunya teori agensi terhadap pengaruh belanja modal di masyarakat.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kinerja instansi keuangan daerah terhadap Belanja Modal jenis Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang teori keagenan.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Belanja Modal jenis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan tentang indikator kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi, acuan baru dan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan dan bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan. Latar Belakang menjelaskan tentang kondisi *riil* Pemerintah Daerah beserta permasalahan yang ada pada masyarakat selama ini dan unsur-unsur yang mempengaruhi belanja modal untuk pelayanan publik karena hal tersebut merupakan salah satu hakikat dari kemandirian daerah. Rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang menjadi suatu titik permasalahan yang ada di masyarakat. Tujuan dan kegunaan penulisan menjelaskan kelanjutan penelitian ini apakah dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan penelitian bidang Akuntansi Pemerintahan. Sistematika penulisan merupakan intisari dari susunan dan struktur hasil penelitian itu sendiri.

Bab II merupakan tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Landasan teori berisi tentang Teori Keagenan sebagai teori akuntansi utama dalam melakukan penelitian, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), indikator kinerja instansi pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan daerah. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai variabel pendukung yang lain. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini tidak signifikan digunakan sebagai acuan utama

dari penelitian ini tetapi memberikan kontribusi/ pola pikir yang hampir sama. Penulis mereplikasi dengan jurnal lain dan *issue* terbaru dalam masyarakat. Dalam penelitian ini juga terdapat kerangka penelitian untuk memudahkan pembaca dalam mengapresiasi penelitian ini. Pengembangan hipotesis merupakan suatu asumsi untuk melihat hasil dari penelitian ini dengan berdasarkan pada teori agensi.

Bab III adalah metode penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data metode analisis .

Bab IV berisi analisis hasil penelitian mengenai kemandirian daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dan potensi peningkatan PAD dan hubungannya dengan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Baik secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

Bab V yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen memunculkan permasalahan keagenan seperti tidak adanya kesinkronan dalam hal utilitas. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* Jensen dan Meckling (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009).

Menurut Lane (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Bergman & Lane (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Petrie (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) mendefinisikan *moral hazard* dan *adverse selection* sebagai berikut:

“Moral hazard refers to the tendency of an agent, after the contract is entered into, to shirk or otherwise not fully seek to promote the principal’s interests. Adverse selection refers to the inability of a principal to determine, before the contract is entered into, which among several possible agents is most likely to promote the principal’s interests; and,

given this imperfect information, the tendency for candidates with less than average motivation or qualifications to apply”.

Selanjutnya Gilardi (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) menyatakan, bahwa:

“Adverse selection (or ex-ante opportunism, or hidden information) occurs whenever the principal cannot be sure that he is selecting the agent that has the most appropriate skills or preferences and moral hazard (or ex-post opportunism, or hidden action) occurs whenever the agent’s actions cannot be perfectly monitored by the principal”.

Sementara itu menurut Lane (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009):

“Adverse selection meaning opportunism before the making of the contract between principal and agent, moral hazard meaning opportunism after the making of the contract between principal and agent”.

Menurut Carr & Brower (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009), model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak: (1) *behavior-based*, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen dan (2) *outcome-based*, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Para teoretisi berpegang pada proposisi bahwa *agents behave opportunistically toward principals*. Oportunisme bermakna bahwa ketika terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen, kerugian prinsipal karena agen mengutamakan kepentingannya (*agent self-interest*) kemungkinan besar akan terjadi.

Menurut Moe (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009), di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan *principal-agent* yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Gilardi dan Strom (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*), yakni pendelegasian dari

masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Hubungan tersebut tidaklah selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian, seperti yang dinyatakan oleh Andvig et al. (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009)

“Principal-agent models are sometimes constructed for situations where the P-A relationship is not established within a given hierarchy, but where A may be a head of one and P represents another that in some sense has a superior role. For example, a parliament is often considered as the principal of the public bureaucracy, and the voters the principal of the parliament, and so on.”

2.1.1.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Moe dalam Halim dan Abdullah, 2009). Seperti dikemukakan sebelumnya, di antara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Lupia & McCubbins (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi legislatur dapat diartikan sebagai fenomena yang disebut *agency problems*. Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan di sini terjadi

setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Johnson (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) menyebut hubungan eksekutif atau birokrasi dengan legislatif atau kongres dengan nama *self-interest model*. Dalam hal ini, *legislators* ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, *legislators* mencari program dan *projects* yang membuatnya populer di mata konstituen. Birokrat mengusulkan program-program baru karena ingin *agency*-nya berkembang dan konstituen percaya bahwa mereka menerima *benefits* dari pemerintah tanpa harus membayar biayanya secara penuh.

Hubungan keagenan eksekutif-legislatif juga dikemukakan oleh Andvig et al. dan Lupia & McCubbins (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009). Sebagai Prinsipal, legislatif dapat juga berperilaku *moral hazard* atau dalam merealisasikan *self-interest*nya Elgie & Jones (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) seperti berlaku korup (*corrupt principals*). Menurut Colombatto (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) adanya *discretionary power* di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan, seperti terjadinya perilaku *rent-seeking* dan korupsi.

Dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith & Bertozzi dalam Halim dan Abdullah, 2009). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer & Khemani (dikutip oleh Halim dan Abdullah, 2009) secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk

memenuhi *self-interestnya*. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang digunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

2.1.1.2 Hubungan Keagenan dalam Pemanfaatan Anggaran Daerah di Indonesia

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.
2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 110/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.

4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran.

Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.1.3 Masalah Keagenan di Eksekutif

Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislatif (asimetri informasi). Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan

perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung *slack* seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. *Slack* tersebut terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Halim, 2009).

Proses penyusunan anggaran (APBD) diawali dari rencana pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Pemilihan pelayanan (dalam bentuk kegiatan) direncanakan secara bersama-sama dengan inisiatif terbesar ada di pihak eksekutif. Eksekutif kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan, program, dan prioritas anggaran. Rangkuman usulan kegiatan dan anggarannya ini kemudian disampaikan kepada legislatif untuk dibahas terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Realisasi perilaku oportunistik eksekutif dalam pengusulan belanja ini di antaranya adalah:

1. Mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas.
2. Mengusulkan kegiatan yang memiliki *lucrative opportunities* (peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar.

3. Mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan.
4. Mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan anggaran setiap kegiatan.
5. Memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya.

2.1.2 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim dan Abdullah (2002) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan

keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Sementara pihak meragukan kemampuan daerah, baik dari segi kesiapan sumberdaya manusia maupun perangkat pendukungnya, sementara yang lain berpandangan bahwa saat pemerintah daerah bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pelayan masyarakat dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Ekses lain adalah keterbukaan atas informasi yang semakin luas sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diamati oleh masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Halim, 2004).

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

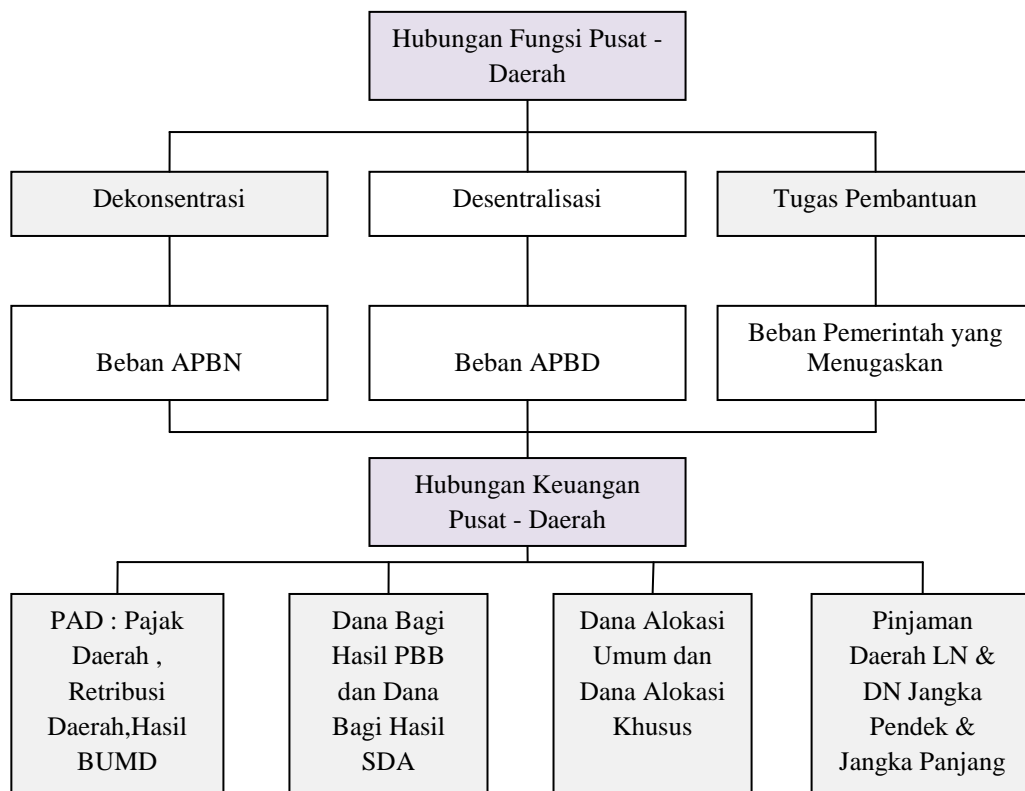
Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25 %	Instruktif
Rendah	25 % - 50 %	Konsultatif
Sedang	50 % - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75 % - 100 %	Delegatif

Sumber : *Halim (2002 ,189)*

Pemerintah pusat pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan

fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar–dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Warsito , 2008 ; 48).

Gambar 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah



Sumber : Halim, 2002,8

Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, Undang–Undang No. 17 tahun 2003 menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah.

Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Kinerja instansi pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan (Syamsi,1986: 199). Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah,

kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990: 26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:231).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendaptan dalam pembentukan pendapatan daerah.

- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007) yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2002).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah

tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisis keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

2. Badan eksekutif

Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.

3. Badan pengawas keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Investor, kreditor dan donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

5. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.

6. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

7. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).

2.1.4.1 Analisis Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2002:128) sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan dengan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2008 : 233).

2.1.4.2 Analisis Efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan.

Rumusan rasio efektifitas yaitu :

$$\text{Efektifitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

2.1.4.3 Analisis Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007).

Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

2.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Selisih antara pendapatan disatu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer.

SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah suatu indicator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indicator efisiensi karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan positif dimana komponen pembiayaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan.

Dalam LRA juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto.

Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai Silpa, dimana Silpa ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun

2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18).

Sumber Pendapatan Asli Daerah, diperoleh dari:

2.1.6.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh dari orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2004) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan kata lain pajak digunakan untuk memenuhi fasilitas publik sehingga meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi :

a. Pajak Propinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman

b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel

2. Pajak restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan

7. Pajak Parkir

2.1.6.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 dan PP No. 66 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan :

1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti :
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

penguburan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan lain-lain.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.6.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-Undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya

diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain, bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah dan lain-lain.

2.1.6.4 Lain-lain PAD yang sah

Yang termasuk dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah antara lain : hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.

Artinya PAD menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Menurut Kaho (2007: 136), salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Menurut Halim (2007: 1997), pemerintah daerah menghadapi dilema, di satu sisi mereka harus meningkatkan terus jumlah PAD-nya untuk mengimbangi semakin meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di sisi lain potensi di daerah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah relatif kecil. Sidik *et.al* (2004: 77) juga mengatakan, sebagai rangkaian dari pengalihan kewenangan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, dukungan pembiayaan yang memadai akan menjadi syarat utama guna mencapai hasil optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat di satu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah di satu sisi membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008: 44) menjelaskan, rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah ditunjukkan oleh data tahun

2001 sampai dengan tahun 2005 bahwa kontribusi PAD terhadap APBD hanya kurang dari 10%. Peranan PAD yang relatif kecil menyebabkan penerimaan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Kuncoro (2004:13), setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu: 1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif dan *buoyant* baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat; 3) kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; 4) bersifat politis, adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme; 5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sidik *et.al* (2004: 75) mengatakan, selama ini rendahnya PAD dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah. Sumber-sumber potensial di daerah sudah diambil sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber penerimaan yang kurang potensial. Dalam hal yang sama Kumorotomo (2008: 364) mengatakan, karena pajak-pajak yang memberi hasil tinggi tidak didesentralisasikan, kontinuitas kebijakan yang lain ialah bahwa ketergantungan daerah kepada bantuan pemerintah pusat masih tetap tinggi seperti ditunjukkan oleh besarnya persentase DAU di dalam anggaran pemerintah daerah.

2.1.7 Belanja Modal untuk Pelayanan Publik

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006)

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah.

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja modal jenis Pelayanan Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal

jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Rasio belanja modal pemerintah terhadap Total Belanja (disebut juga indikator *CAPEX* atau *Capital Expenditure*) mengukur seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam penganggaran yang berorientasi kepada manfaat jangka panjang atau investasi. Belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, rumah sakit dan pembangunan fisik lainnya, termasuk juga sarana dan prasarana pemerintahan, baik kantor bupati maupun kantor unit kerja-unit kerja yang ada di daerah.

2.1.8 Luas Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Luas wilayah dalam hal ini apakah besarnya berpengaruh terhadap jumlah realisasi belanja modal pemerintah yang erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik.

2.1.9 Dana Alokasi Khusus

Kebijakan DAK secara spesifik: (www.depkeu.djpk.go.id)

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.

2.1.10 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro, 2004). Indikator lain untuk mengetahui Keberhasilan pembangunan pada aspek pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dinilai dengan Indeks Gini.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Heny Susantih dan Yulia Saftiana (2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah tidak mempunyai perbedaan yang signifikan pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ke-lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain.

Joko Tri Haryanto (2005) menyimpulkan bahwa dari hasil olah data dengan menggunakan metode *path analysis* di dapatkan hasil bahwa variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (untuk proxy Kemandirian Daerah). Sementara

itu variabel Retribusi Daerah dan PDRB jasa tidak terbukti mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah secara signifikan.

Vegasari Endah Kusumawati (2011) meneliti bahwa Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan. rasio efektifitas tahun lalu tidak berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan dan rasio efisiensi tahun lalu tidak berpengaruh negatif terhadap PAD tahun berjalan. PAD tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan. Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan. Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan.

Priyo Hari Adi (2006) meneliti bahwa Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Per Kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah.

Ardi Hamzah (2006) menyatakan bahwa pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian, dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat pengaruh secara positif, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh secara negatif.

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2004) yang meneliti tentang teori keagenan di dalam penganggaran sektor publik berpendapat bahwa hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik. Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi publik. Konsep perwakilan (*representativeness*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbela seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif. Di sisi lain, eksekutif sebagai agen cenderung menjadi *budget maximizer* karena berperilaku oportunistik (*adverse selection* dan *moral hazard* sekaligus).

Mutiara Maimunah (2006) menyatakan bahwa nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga yang tujuannya adalah untuk mengetahui terjadi tidaknya *flypaper effect*, juga diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.

IG.K.A Ulupui (2007) menyatakan bahwa Variabel *current ratio* , *return on asset* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *return* saham satu periode ke depan. Tetapi variabel *debt to equity ratio* memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Variabel *total asset turn over* menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan. Meskipun penelitian ini mengindikasikan bahwa rasio aktivitas belum mendapat perhatian dari investor untuk memprediksi *return*,

diharapkan investor dapat mengamati aktivitas perusahaan berdasarkan rasio aktivitas ini.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

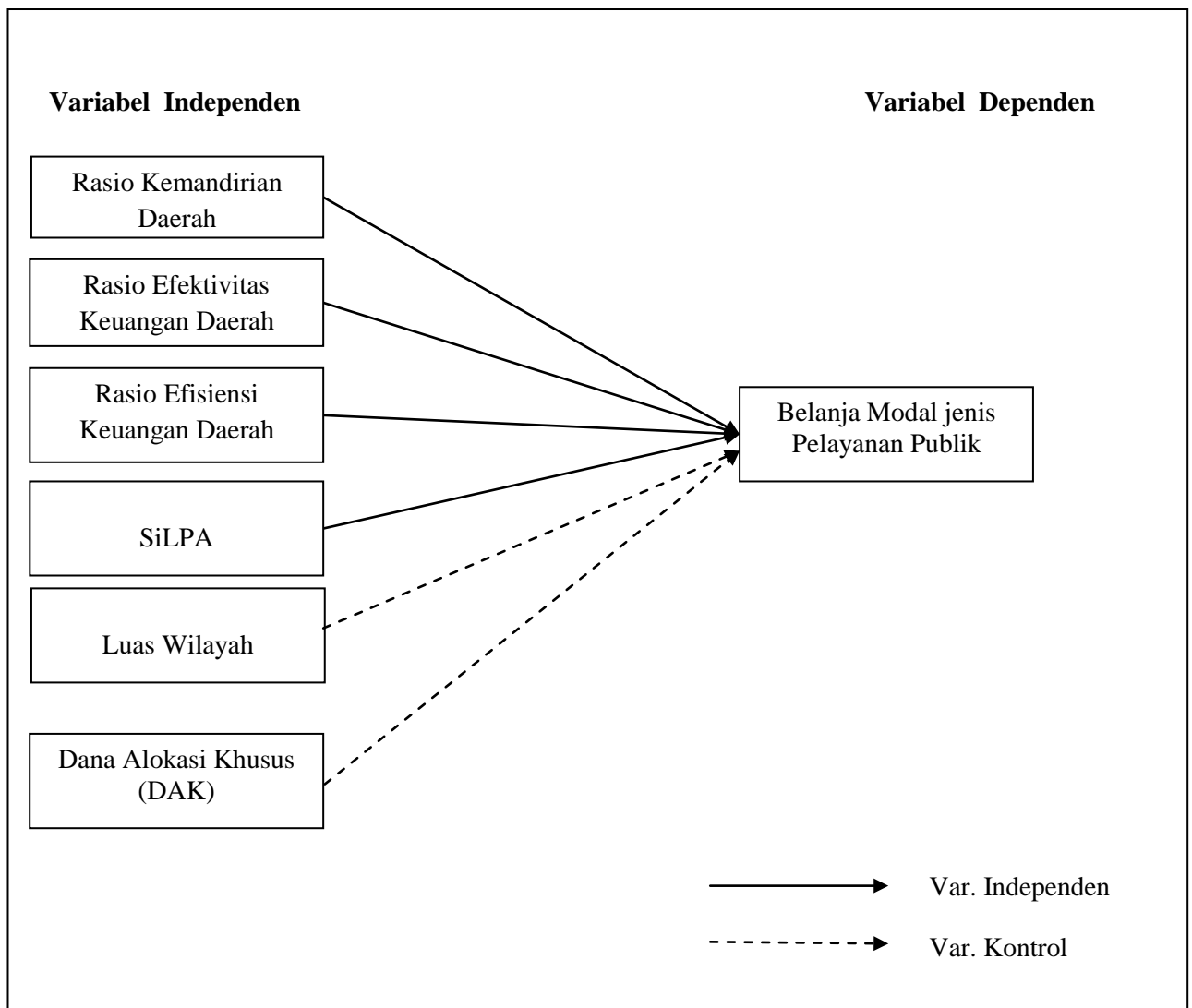
Peneliti	Judul dan Variabel	Analisis	Hasil
Heny Susantih dan Yulia Saftiana (2009)	“Perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah propinsi se-sumatera bagian selatan)”	Uji Beda <i>Kolmogorof Smirnov</i>	Ke-lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain.
Priyo Hari Adi (2006)	“Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah,Belanja Pembangunan,dan Pendapatan Asli Daerah” Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi, PAD	Analisis Deskriptif dan Analisis Jalur	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi • Belanja modal untuk pelayanan publik berpengaruh positif terhadap PAD • Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD
Joko Tri Haryanto (2005)	“Kemandirian Daerah ,sebuah perspektif dengan metode path analysisi” Pajak Daerah,Bagi Hasil Pajak,Retribusi Daerah,PDRB, Kapasitas Fiskal,	Metode Path Analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak memiliki hubungan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah • Retribusi Daerah dan PDRB jasa tidak terbukti mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah

Vegasari Endah Kusumawati (2011)	<p>Faktor-Faktor yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Indonesia Survei pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Tengah.</p> <p>R. Kemandirian, R. Efektivitas, R. Efisiensi, Belanja Modal, PAD</p>	Regresi dan Uji Chow	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan. • Rasio efektifitas tahun lalu tidak berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan dan • Rasio efisiensi tahun lalu tidak berpengaruh negatif terhadap PAD tahun berjalan. • PAD tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan. • Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan. • Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan.
Ardi Hamzah (2006)	<p>Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur</p> <p>Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi</p>	Analisis Jalur	Rasio kemandirian ¹ , Rasio kemandirian ² , dan Rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
IG.K.A Ulupui(2007)	<p>Analisis pengaruh rasio likuiditas, <i>leverage</i>, aktivitas, dan Profitabilitas terhadap <i>return</i> saham</p> <p>Current Ratio, ROA, TATO, DER</p>	Analisis Regresi	<i>current ratio</i> , <i>return on asset</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap <i>return</i> saham, <i>debt to equity ratio</i> memiliki pengaruh positif tidak signifikan dan variabel <i>total asset turn over</i> menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

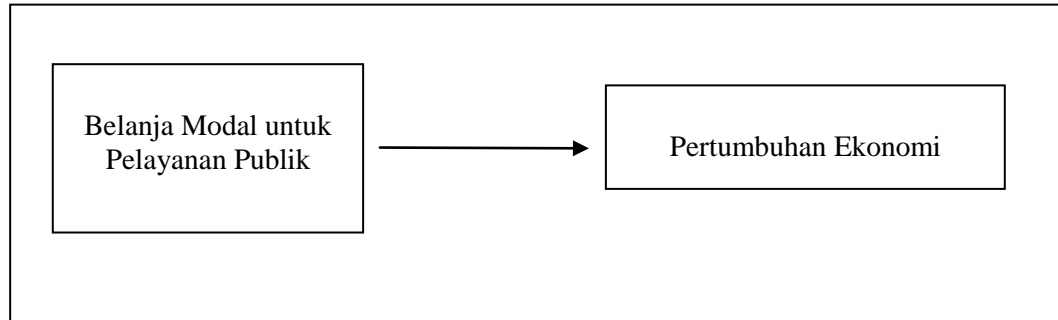
Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan kajian teoritis serta permasalahan yang telah dikemukakan maka secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis (Model 1)



Sumber: Dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis (Model 2)



Sumber: Dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Hubungan Kemandirian Daerah dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik

Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD (Dwirandra, 2006).

Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Stiglitz, 1987 dan Pratt & Zeckhauser, 1985 dalam Gilardi, 2001). Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan - kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan

atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen) (Halim, 2003). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran Belanja Modal yang tujuannya benar – benar untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin kecil tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer Pemerintah Pusat, maka dapat dikatakan rasio kemandirian daerah tinggi. Hipotesis yang dikembangkan dari pemaparan ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 (H1) : *Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal untuk pelayanan publik.*

2.4.2 Hubungan Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah dengan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik

Semakin tinggi rasio efektivitas ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD (Dwirandra,2006).

Dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami perbaikan sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya (Setyawan,2005).

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Mengacu pada teori keagenan, sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Hamzah, 2006). Jika nilai efisiensi tinggi, maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi.

Dalam konteks efisiensi dan efektivitas anggaran, maka pemanfaatan anggaran secara sederhana dapat dikatakan bertujuan untuk memberikan efek kepada peningkatan kualitas layanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal yang menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya (Chalid, 2005).

Dari penjelasan di atas, penulis mengembangkan hipotesis :

Hipotesis 2 (H2) : *Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal untuk pelayanan publik*

Hipotesis 3 (H3) : *Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik*

2.4.3 Hubungan SiLPA dengan Belanja Modal untuk Pelayan Publik

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diindikasikan menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal untuk pelayanan publik. Belum ada penelitian mengenai pengaruh SiLPA terhadap belanja modal karena dalam pelaksanaannya terkadang belum ada maksimalisasi pemanfaatannya seperti kutipan oleh Abdul Hafiz Tanjungdi bawah ini :

“Silpa sebesar 40,27% dari APBD Jabar 2008 tersebut datangnya dari penundaan program dan kegiatan, maka dapat dikatan bahwa sumber daya manusia pemda Jabar pada tahun 2008 lebih banyak menganggur dibanding bekerja melayani kebutuhan masyarakat, dan secara keseluruhan bisa juga dikatakan bahwa pemda Jabar tidak mampu mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya (manusia, dana, dan peralatan) menghasilkan barang/jasa untuk dinikmati masyarakat sehingga hak-hak masyarakat Jabar jadi hilang pada tahun 2008. Ketidak mampuan ini bisa disebabkan rendahnya profesionalitas dan kompetensi pegawai. Barang/jasa tersebut dapat berupa perbaikan jalan umum yang rusak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana lainnya yang dapat dinikmati masyarakat Jawa Barat”.

Selain itu, SiLPA yang digunakan untuk pembiayaan juga berdasarkan persetujuan dewan legislatif. Dalam perspektif teori keagenan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah turut mencanangkan jumlah alokasi dan pemanfaatan pembiayaan sehingga pihak legislaif mendapatkan wewenangya kembali. Pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah adalah agen dan pihak legislatif adalah prinsipal.

Dari kutipan di atas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah :

Hipotesis 4 (H4) : *SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik*

2.4.4 Hubungan Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dengan Pertumbuhan Ekonomi

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002).

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik

tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002). Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3 % merupakan retribusi (Lewis, 2003). Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah.

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997).

Kaitannya dengan teori agensi dalam penganggaran, Pemerintah Daerah mengakomodasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi. Menurut Andvig et al. (2001) *principal-agent model* merupakan rerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang

sifatnya lebih sempit. Lebih jauh, Christensen (1992) menyatakan teori prinsipal-agen dapat menjadi alat analitis untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran publik.

Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

Hipotesis 4 (H4) : *Belanja Modal untuk pelayanan publik berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat Empat (4) variabel independen, yaitu variabel Kemandirian Daerah (KD), Efektivitas Keuangan Daerah (EFEKD), Efisiensi Keuangan Daerah (EFIKD), dan SiLPA. Variabel dependen adalah Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Dalam penelitian ini juga terdapat Dua (2) variabel kontrol yaitu Luas Wilayah (LW) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjabarkan variabel ke dalam suatu penelitian yang berupa indikator yang lebih terperinci, sehingga akan mempermudah pengukurannya. Pengukuran secara operasional adalah :

3.1.1 Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil, dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Rumusan rasio kemandirian daerah yaitu :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah}$

yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah (penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah)).

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Tingkat Kemandirian adalah :

1. Membuat tabel perkembangan APBD tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun Anggaran 2009.
2. Mengidentifikasi PAD dan total Penerimaan untuk masing-masing tahun Anggaran.
3. Membandingkan antara PAD dengan Total Penerimaan.
4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut dengan berpatokan pada :
 - a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - b. Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - c. Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan

tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- d. Apabila tingkat kemandirian 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah.

3.1.2 Efektifitas Keuangan Daerah

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan.

Rumusan rasio efektifitas yaitu :

$$\text{Efektifitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Efektivitas

1. Membuat tabel target dan realisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009.
2. Mengidentifikasi target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD untuk masing-masing tahun anggaran.
3. Membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
4. Menentukan tingkat efektivitas.

Untuk menentukan tingkat efektivitas tidaknya pungutan PAD digunakan asumsi sebagai berikut :

- a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD semakin efektif
- b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD kurang efektif. Namun menurut Halim (2002:129) apabila rasio efektivitas mencapai 1 (100%) berarti daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.

3.1.3 Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Efisiensi adalah:

1. Membuat tabel belanja dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009.
2. Mengukur tingkat efisiensi.

3.1.4 SiLPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun sebelumnya. Variabel ini diukur dari jumlah SiLPA yang ada di Laporan Realisasi APBD per Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3.1.5 Luas Wilayah

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

3.1.6 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23).

Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN . Kebutuhan khusus

adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3.1.7 Belanja Modal jenis Pelayanan Publik

Perhitungan untuk Belanja Modal menggunakan acuan Neraca Keuangan Daerah. Belanja Modal yang diasumsikan sebagai Belanja Modal untuk Pelayanan Publik diindikasikan oleh Belanja Tanah, Gedung atau Bangunan, Buku Perpustakaan, Jalan dan Irigasi.

3.1.8 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering di ukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro,2004). Indikator lain untuk mengetahui Keberhasilan pembangunan pada aspek pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dinilai dengan Indeks Gini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Indeks /Ratio Gini untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang dapat mencerminkan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah.

Tabel 3.1
Definisi Operatif Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Y)	Realisasi Belanja Modal yang diasumsikan untuk Pelayanan Publik	Jumlah Belanja Modal (berdasarkan CaLK dan Neraca) dibandingkan dengan Jumlah Total Belanja	Rasio
2	Pertumbuhan Ekonomi (Z)	Pemerataan Pendapatan	Dilihat dari nilai Indeks Gini	Rasio
3	Rasio Kemandirian Daerah - KD (X1)	Rasio Kemandirian Daerah Tahun sebelum Realisasi Belanja Modal	PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah	Rasio
4	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah - EFEKD (X2)	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun sebelum Realisasi Belanja Modal	Realisasi PAD dibandingkan dengan Target Penerimaan PAD	Rasio
5	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah - EFIKD (X3)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun sebelum Realisasi Belanja Modal	Realisasi Pengeluaran dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan	Rasio
6	SiLPA (X4)	Seluruh SiLPA (tahun sebelumnya)	Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan	Rasio
7	Luas Wilayah (LW) (X6)	Luas Wilayah Daerah Berkenaan	Luas Tidaknya suatu Daerah yang akan mempengaruhi besarnya Belanja Modal	Rasio
8	Dana Alokasi Khusus -DAK (X7)	Realisasi Dana Alokasi Khusus	Realisasi Dana Alokasi Khusus dibandingkan dengan Dana Perimbangan	Rasio

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

b. Sampel Penelitian

Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi (metode sensus) dikarenakan tersedianya seluruh data.

Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2007 hingga 2008 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007-2009 dengan data penelitian sebanyak 105 daerah, dimana jumlah tersebut diperoleh dengan rumus:

$N = \text{jumlah daerah} \times \text{periode penelitian}$

$N = 35 \times 3 \text{ tahun}$

$N = 105$

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan *pooled data*, yaitu kombinasi antara data time series dengan data *cross section* selama periode tahun 2006 sampai dengan 2009. Pemilihan data untuk ketiga tahun realisasi anggaran tersebut dengan pertimbangan bahwa saat tersebut merupakan tahun-tahun awal pelaksanaan Kepmendagri 13/2006. Data penelitian berupa :

- a. Data Neraca Daerah, realisasi PAD, Total Penerimaan Daerah, DAK, dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007–2008 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

(www.dipk.depkeu.go.id).

- b. Data realisasi PAD, Total Penerimaan Daerah, DAK, dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah.
- c. Data Pertumbuhan Ekonomi diproksikan dengan Indeks Gini 2006 - 2008 diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis *Least Squares* (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yang merupakan analisis perhitungan terhadap angka-angka dan perbandingan untuk menarik kesimpulan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, dua komponen dari pendapatan daerah yaitu PAD, dan DAU sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai variabel dependen. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan di bawah ini:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut.

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

3.5.3 Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu Kemandirian Daerah terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa belanja modal. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS seri 17.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (sekarang, 1992). Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y_1 = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6 + e_1$$

dan

$$Z_1 = \alpha + b_1 Y_1 + e_2$$

dimana :

Y_1 = Belanja Modal

Z_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_1 = Kemandirian Daerah

X_2 = Efektivitas Keuangan Daerah

X_3 = Efisiensi Keuangan Daerah

X_4 = SiLPA

X_5 = Luas Wilayah

X_6 = Dana Alokasi Khusus

Y_1 = Belanja Modal jenis Pelayanan Publik

Z_1 = Pertumbuhan Ekonomi

$b_1 b_2$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistic disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternative diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$ (Ghozali, 2006).